



**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)  
KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMAHAMAN  
AKUNTANSI BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jember)

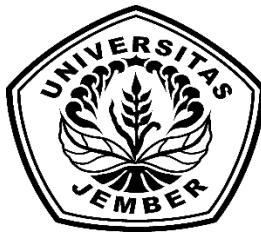
**SKRIPSI**

Oleh :

**BIMA ALBAJILI  
NIM 170810301235**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)  
KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMAHAMAN  
AKUNTANSI BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Akuntansi (S1) dan mencapai gelar sarjana ekonomi

Oleh :

**BIMA ALBAJILI**

**NIM 170810301235**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

**PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmannirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur atas izin, rahmat dan hidayat yang telah diberikan oleh

Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju terang benderang.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang ikut serta memberi doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

Ibunda **Sulastri** tercinta yang senantiasa menyertakan dukungan, kepercayaan serta doa untuk saya dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini agar kelak mencapai keberhasilan. Serta, **Dimas Arya** adik dan kakak tersayang yang selalu memotivasi saya dalam menuntut ilmu.

**MOTTO**

*“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman.”*

( Q.S Ali ‘Imran: 139 )

*“Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, selalu belajar dengan siapapun serta terapkan ilmu yang di dapat dalam masa kini, karena melalui masa kini kita dapat belajar memperbaiki masa lalu dan menjadi lebih baik dimasa depan.”*

( Bima Albajili, 2020)

*“Nothing worth having comes easy. Get up, stand up, and fight for it”*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Albajili

NIM : 170810301235

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Pengendalian Internal, Dan Pemahaman Akuntansi Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”** merupakan hasil karya tulis milik sendiri, kecuali berbagai kutipan dari referensi yang telah disebutkan, belum pernah diterbitkan pada lembaga mana pun, dan bukan hasil plagiarisme. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran dari isi karya ilmiah berdasarkan sikap ilmiah yang saya junjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun dan saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Desember 2020

Yang menyatakan,

Bima Albajili

NIM 170810301235

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH  
(SIMDA) KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
PEMAHAMAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jember)

Oleh

Bima Albajili

NIM. 170810301235

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Bima Albajili  
NIM : 170810301235  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal : 1 September 2020  
Persetujuan

Pembimbing I,



Andriana, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 198209292010122002

Pembimbing II,



Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197405062002121006

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi S1-Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.  
NIP. 19780927 200112 1002



**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH  
(SIMDA) KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
PEMAHAMAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bima Albajili  
NIM : 170810301235  
Jurusan : Akuntansi

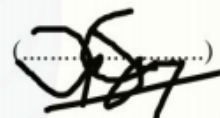
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Desember 2020

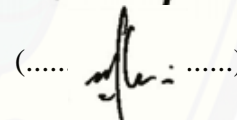
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua : Drs. Sudarno, M.Si, Ak



Sekretaris : Alfi Arif, S.E., M.Ak., Ak



Anggota : Resha Ayu Dwi P., SE., M.A., Ak



Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si  
NIP 196610201990022001



**ABSTRAK**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)  
KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMAHAMAN  
AKUNTANSI BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

Bima Albajili

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Laporan keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan selama satu tahun buku dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana publik yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, laporan keuangan daerah yang berkualitas apabila memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh SIMDA keuangan, pengendalian internal dan pemahaman akuntansi basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian adalah BPKAD dan pegawai OPD dinas dan kecamatan bagian akuntansi atau keuangan kabupaten jember. Pengelolaan data dilakukan menggunakan metode analisis linier berganda yang diolah dengan software *SPSS*. hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMDA keuangan, pengendalian internal dan pemahaman akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Daerah, SIMDA keuangan, pengendalian internal, akuntansi basis akrual.

**ABSTRACT**

*THE INFLUENCE OF FINANCIAL REGIONAL MANAGEMENT  
INFORMATION SYSTEM, INTERNAL CONTROL, AND UNDERSTANDING OF  
ACCRUAL BASE ACCOUNTING ON THE QUALITY OF REGIONAL  
FINANCIAL STATEMENTS*

Bima Albajili

Bachelor Degree In Accounting Department, Business And Economic Faculty of  
Jember University

Regional financial statements are a summary of a process of recording financial transactions for one financial year and a form of government accountability for the management of public funds that are prepared in accordance with applicable accounting standards, the quality of regional financial statements determined by some characteristics such as relevant, reliable, comparable and understandable. This study aims to find out the influence of financial regional management information system, internal control and understanding of accrual base accounting on the quality of regional financial statements. This research is a quantitative research with research samples are accounting or finance staff of financial management and regional assets board, local government agency, and the office of sub-district Kabupaten Jember. The data analyzed by using multiple linear analysis methods processed with SPSS software. The results showed that financial regional management information system, internal control and understanding of accrual base accounting affect the quality of regional financial statements.

Keyword : Quality of Regional Financial Statements, Financial Regional Management Information System, Internal Control, Accrual Base Accounting.

## RINGKASAN

**Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan, Pengendalian Internal, Dan Pemahaman Akuntansi Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jember);** Bima Albajili 170810301235; 2020; 79 halaman; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Laporan keuangan yang harus diberikan pemerintah daerah adalah laporan yang dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena akan dijadikan acuan sebagai dasar dari pengambilan keputusan, baik disektor publik ataupun non publik (Kiranayanti & Erawati, 2016). Kualitas laporan keuangan sektor publik harus diperhatikan sesuai dengan standart pembuatan laporan keuangan yang ada, karena laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah pada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami, dan bias memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Sudirianti et al, 2015).

Menurut PP No.71 Tahun 2010 menjelaskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam menyusun tujuh jenis laporan keungan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas, karena banyak yang masih mengendalkan informasi laporan keuangan yang publikasikan oleh pemerintah daerah dengan kepentingan yang berbeda.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan akan disampaikan kepada publik, dipertanggungjawabkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian audit BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP) (PP No. 24 Tahun 2005). Mepresentasikan kewajaran dapat dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan aturan dan kriteria kesesuaian laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, kecakupan pengungkapan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2019).

Peneitian ini mengacu pada peneliti terdahulu atau yang pernah dilakukan oleh, Egit Gunadi (2017), Nugraha Ekatama (2017), Meinarni Asnawi (2019), Nila Aprilia (2019) dan Meisy Hendri (2020) berserta penelitian yang serupa terkait dengan variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sry Ayem dan Idham Husen (2017) menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pernyataan tersebut dikarenakan kurangnya pengoprasian SIMDA di SKPD Yogyakarta kurang efektif. hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nila Aprilia (2019) dan Meisy Hendri (2020) menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Rama Ardianto (2019) menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pernyataan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Tangerang, hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismi Deshinta (2017) dan Meinarni Asnawi (2019) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lalu Hasil penelitian yang dilakukan Merinta Prameswari (2016)



menyatakan bahwa kurangnya pemahaman pegawai akuntansi basis akrual, pernyataan itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman staf bagian akuntansi terhadap basis akrual dan kurangnya teknologi informasi yang memadai, namun hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida ayu (2016) dan Ratna Wijayanti yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan adanya fenomena berdasar dari penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga peneliti ingin meneliti kembali penelitian serupa pada Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hal dalam penelitian ini yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, variabel independen yang dipilih disesuaikan dengan kondisi Pemerintahan Kabupaten Jember dimana variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penyesuaian variabel tersebut dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruhnya terhadap laporan keuangan daerah. Kedua, terdapat penambahan item kuisisioner pada setiap variabel dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Jember sendiri yang didasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Ketiga, penelitian ini dilakukan secara menyeluruh kepada pegawai BPKAD dan OPD bagian akuntansi atau keuangan, berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyebar kuisisioner kepada pegawai BPKAD. Keempat, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Bintang, Badung, Tangerang, dan kantor walikota Yogyakarta. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dengan adanya penelitian ini dapat menunjukkan seberapa penting pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Basis Akrual bagi laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki 31 kecamatan, 8 badan divisi, dan 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana setiap OPD memiliki fungsi dan tugas masing-masing, salah satunya Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) yang merupakan objek dari penelitian ini telah berhasil menyelesaikan hasil temuan BPK pada tahun 2019

secara tepat waktu, Kabupaten Jember telah menyelesaikan temuan atas kekurangan dan kelebihan bayar tahun anggaran 2019 kurang lebih sekitar 80% sudah terbayar pada tahun 2020, serta menganggarkan kekurangan pembayaran pada tahun sebelumnya pada anggaran tahun 2020, serta temuan terkait penjurnalan pada masing masing OPD akan dibina dan diawasi secara langsung oleh pegawai BPKAD bidang akuntansi untuk tindak lanjut penyusunan Laporan keuangan 2020 (Feri, 2020).

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pentingnya pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian adalah BPKAD dan pegawai OPD dinas dan kecamatan bagian akuntansi atau keuangan kabupaten jember. Pengelolaan data dilakukan menggunakan metode analisis linier berganda yang diolah dengan software *SPSS*. hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMDA keuangan, pengendalian internal dan pemahaman akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## PRAKATA

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga penulis dapat tuntas melaksanakan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan, Pengendalian Internal, Dan Pemahaman Akuntansi Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jember)”** yang dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna menyelesaikan program pendidikan S1 akuntansi.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
3. Ibu Andriana, S.E., M.Sc, Ak dan Bapak Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan banyak memberi masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen, staf pengajar dan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan.
6. Keluarga besar Sudarmo yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya.
7. Ibu Sulastri dan Adik Dimas Arya yang selalu memberikan dorongan agar saya tidak pernah menyerah.
8. Raninaila, Rinta, Dicky, Mita, Bayu, Unggul, Enggar dan Fredy yang tidak pernah lelah menjadi penyemangat saya.



9. Keluarga Bismillah, Kontrakan, Pejuang Skripsi serta Teman SMP dan SMA selalu menjadi teman pelipur lara dan penyemangat saya.
10. Seluruh anggota UKM SPORT, KSPM dan PANWASLU dan seluruh anggota Kelompok Unit Kegiatan Mahasiswa yang mengajarkan saya dalam berorganisasi.
11. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi 2017.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah kepada seluruh pihak yang bersedia membantu dengan ikhlas sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan dari skripsi ini, oleh sebab itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat serta pengetahuan tambahan bagi seluruh pembacanya,

*Alhamdulillahirabbilalamin*

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jember, Januari 2020

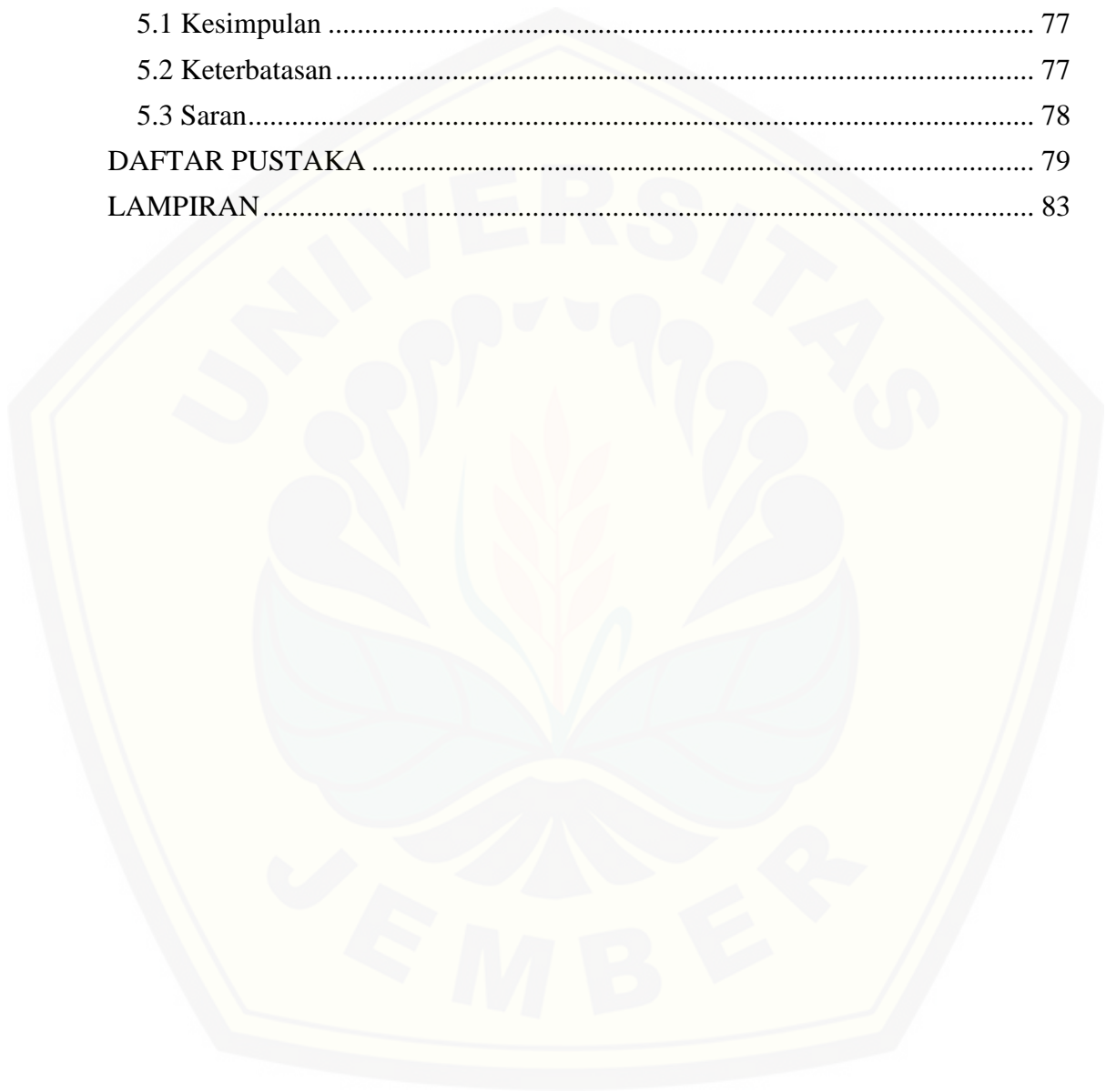
Penulis

**DAFTAR ISI**

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
RINGKASAN .....	xi
PRAKATA.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	12
2.1 <i>New Public Management</i> .....	12
2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan .....	13
2.2.1 Sistem Informasi Manajemen .....	13
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen .....	14
2.2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan .....	16
2.4 Pengendalian Internal.....	19
2.5 Pemahaman Akuntansi Basis Akrua.....	20
2.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	22
2.7 Penelitian Terdahulu .....	25
2.8 Kerangka Konseptual .....	36
2.9 Hipotesis Penelitian.....	37
2.9.1 HUBUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH .....	37

2.9.2 HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH .....	38
2.9.3 HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	39
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	41
3.2 Populasi dan Sampel .....	41
3.2.1 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3 Definisi Variabel Operasional dan Skala Pengukurannya .....	43
3.3.1 Definisi Variabel Operasional.....	43
3.4 Analisis Data .....	46
3.4.1 Statistik Deskriptif .....	46
3.4.2 Uji Kualitas Data.....	46
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.1 Uji Normalitas.....	48
3.5.2 Uji Multikolinearitas .....	49
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	49
3.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
3.7 Uji Hipotesis .....	51
3.7.1 Uji F .....	51
3.7.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	51
3.7.3 Uji t .....	52
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah .....	53
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum.....	54
4.2 Analisis Data .....	56
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	56
4.3 Uji Instrumen .....	62
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.5 Uji Hipotesis .....	68
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda .....	70
4.7 Pembahasan.....	72
4.7.1 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	72

4.7.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	73
4.7.3 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	75
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Keterbatasan .....	77
5.3 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan dana kepada setiap pemerintah daerah untuk dikelola berdasarkan kebutuhan daerah masing masing. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 kebijakan yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia sendiri yaitu memberikan kebebasan pada setiap pemerintah daerah di setiap wilayah agar mengatur dan menjalankan pemerintahan dengan bebas untuk mengembangkan sumber daya yang ada disetiap daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu yang berlaku pada sektor pemerintahan. Pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana dan penilaian kinerja, hal tersebut dilandasi karena pemerintahan menyadari perlunya diterapkan akuntansi dalam pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang adil dan transparan.

Laporan keuangan yang harus diberikan pemerintah daerah adalah laporan yang dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena akan dijadikan acuan sebagai dasar dari pengambilan keputusan, baik disektor publik ataupun non publik (Kiranayanti & Erawati, 2016). Kualitas laporan keuangan sektor publik harus diperhatikan sesuai dengan standart pembuatan laporan keuangan yang ada, karena laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah pada para pengguna laporan keuangan. Laporan keungan yang berkualitas dapat dikatakan baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Sudirianti et al, 2015). Menurut PP No.71 Tahun 2010 menjelaskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam menyusun tujuh jenis laporan keungan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL),

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas, karena banyak yang masih mengendalkan informasi laporan keuangan yang publikasikan oleh pemerintah daerah dengan kepentingan yang berbeda. Menurut PP No.71 Tahun 2010 kualitas karakteristik laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normative yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan kualitas yang diinginkan sesuai standard yaitu:

1) Relevan

Jika informasi dalam laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan pengguna (*user*), maka laporan keuangan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang relevan. Suatu informasi yang bernilai relevan meliputi bermanfaat bagi pengguna, lengkap, ketepatan waktu, dan bermanfaat baik bagi pembuat laporan keuangan.

2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila disajikan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau secara fakta yang terbebas dari kesalahan material, kesalahan pencatatan dan jujur. Terdapat beberapa karakteristik dalam mencapai informasi yang andal seperti, dapat diverifikasi, bersifat netral serta disajikan secara jujur.

3) Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan yang bermanfaat adalah laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Dapat Dipahami

Jika pengguna memahami informasi sesuai dengan batas kemampuan dengan mudah dan paham terhadap isi yang terdapat dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut bernilai informasi yang dapat dipahami.



Dalam laporan keuangan akuntansi dibagi menjadi dua yaitu sektor publik dan sektor privat. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan Lembaga atau organisasi pemerintahan yang berorientasi pada *non profit motive*, sehingga kedudukan akuntansi keuangan daerah berada pada akuntansi sektor publik. Sementara akuntansi sektor privat berkaitan dengan perusahaan berbasis bisnis dan berorientasi pada *profit motive*. Data akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi dan kepada pihak seperti, legislative, eksekutif dan masyarakat (Ekatama, 2017). Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif (Febrian, 2015).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan laporan keuangan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan akan disampaikan kepada publik, dipertanggungjawabkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. (Gunadi, 2017:3) Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian audit BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP) (PP No. 24 Tahun 2005). Mepresentasikan kewajaran dapat dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan aturan dan kriteria kesesuaian laporan keuangan daerah sesuai



dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, pengungkapan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2019).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kota atau kabupaten, sampai dengan kecamatan dan kelurahan di seluruh Indonesia. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang mana sistem informasi disini bisa diartikan sebagai suatu komponen yang digabungkan untuk mencapai tujuan suatu entitas, sedangkan manajemen disini berarti manajemen publik dan manajemen administrasi yang mana menggambarkan tentang suatu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik, sedangkan menurut PP No.12 Tahun 2019 keuangan daerah diartikan sebagai suatu hak dan kewajiban dalam mengelola keuangan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan tentunya hal ini bisa dinilai dengan nominal/uang, biasanya berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau yang biasa disebut dengan APBD serta laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban keuangan dalam satu periode.

Aplikasi SIMDA digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. *Output* yang dihasilkan pada proses penganggaran berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada proses penatausahaan, output yang dihasilkan berupa Surat Penyedia Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), register, dan formulir pengendalian anggaran lainnya. Akuntansi dan pelaporan menghasilkan output berupa Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca, Perda Pertanggungjawaban dan penjabarannya. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 38 Kabupaten/Kota telah menjadi

contoh *best practice* SIMDA keuangan. Dimana prestasi itu diikuti oleh baiknya penerapan SIMDA Keuangan pada Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Timur ([simda-online.com](http://simda-online.com)).

Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki 31 kecamatan, 8 badan divisi, dan 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana setiap OPD memiliki fungsi dan tugas masing-masing, salah satunya Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD). Untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD memerlukan suatu sistem informasi yang berbasis teknologi. Sistem yang selama beberapa tahun terakhir hingga saat ini digunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Pemerintah Kabupaten Jember telah menggunakan aplikasi SIMDA keuangan sejak tahun 2012. Aplikasi ini terus dikembangkan dan akhirnya pada maret 2015 disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi keuangan terbaru dan dipakai hingga saat ini. Dan pada setiap tahunnya SIMDA keuangan selalu dikembangkan oleh BPK untuk mempermudah akses bagi setiap OPD. Simda keuangan adalah sebuah cara dari pemerintah agar dapat mempermudah akses pemrosesan, penyimpanan, dan layanan lainnya yang disediakan dalam suatu virtual terpadu dalam satu jaringan yang menggunakan internet dan dapat di akses oleh para pegawai BPKAD maupun OPD dengan mudah (Sugiyantari et al., 2018). Dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) keuangan diharapkan pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan tepat waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diandalkan sesuai standar yang ada dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Ikriyati & Aprila, 2019).

Laporan keuangan daerah yang berkualitas juga ditentukan dengan seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki oleh institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang kurang baik juga menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi kesalahan proses akuntansi sehingga laporan keuangan yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompoten (Kiranayanti & Erawati, 2016). Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan alasan dikembangkannya penerapan

pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 pengendalian internal didefinisikan sebagai sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang terdiri dari unsur penilaian resiko, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian informasi, komunikasi dan pemantauan pengendalian internal. Komponen pengendalian merupakan juga wajib diciptakan dan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi untuk menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif sehingga penerapan sistem pengendalian internal yang positif saat bekerja membuat terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah serta menjadi landasan awal yang baik dalam tata kelola pemerintah juga sebagai pertanggung jawaban keuangan agar terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah yang baik dapat menyelesaikan hasil temuan laporan keuangan yang diperiksa BPK secara tepat waktu (BPK, 2020).

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pemahaman regulasi akuntansi basis akrual termasuk salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman pegawai pemerintahan mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah, penerapan akuntansi basis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penerapan akuntansi basis akrual juga perlu diimbangi dengan pengetahuan yang cukup baik dalam menentukan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan, jika pemahaman tersebut masih kurang baik, maka juga akan berdampak dengan menurunnya nilai informasi laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ekatama, 2017). Perubahan regulasi akuntansi basis kas (PP No.24 tahun 2005) ke akuntansi basis akrual (PP No.71 Tahun 2010) cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi, jika pemahaman akuntansi basis akrual rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah.

Pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan akuntansi basis akrual ini namun pada tahun 2015 semua laporan keuangan pemerintah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi basis akrual pemerintah Kabupaten Jember sendiri melakukan pencatatan basis akrual mulai tahun 2014 (Perbup Tahun 2014) namun pada penerapannya sumber daya manusia yang terdapat di instansi pemerintah kurang beradaptasi dengan pemberlakuan akuntansi basis akrual ini sehingga dalam penyusunan laporan keuangan mengalami kerendahan kualitas laporan keuangan (Sugiyantari et al., 2018). Dengan diberlakukannya akuntansi basis akrual ini diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan kualitas dan dapat mendapatkan Opini audit badan pemeriksa keuangan yang baik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan oleh, Egit Gunadi (2017), Nugraha Ekatama (2017), Meinarni Asnawi (2019), Nila Aprilia (2019) dan Meisy Hendri (2020) beserta penelitian yang serupa terkait dengan variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sry Ayem dan Idham Husen (2017) menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pernyataan tersebut dikarenakan kurangnya pengoprasian SIMDA di SKPD Yogyakarta kurang efektif. Hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nila Aprilia (2019) dan Meisy Hendri (2020) menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Rama Ardianto (2019) menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pernyataan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Tangerang, hal itu tidak sejalan dengan hasil penelitian Ismi Dshinta (2017) dan Meinarni Asnawi (2019) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lalu Hasil penelitian yang dilakukan Merinta Prameswari (2016) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman pegawai akuntansi basis akrual, pernyataan itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman staf bagian akuntansi terhadap basis akrual dan kurangnya teknologi informasi yang memadai, namun hal



itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida ayu (2016) dan Ratna Wijayanti yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan adanya fenomena berdasar dari penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga peneliti ingin meneliti kembali penelitian serupa pada Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hal dalam penelitian ini yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, variabel independen yang dipilih disesuaikan dengan kondisi Pemerintahan Kabupaten Jember dimana variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penyesuaian variabel tersebut dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruhnya terhadap laporan keuangan daerah. Kedua, terdapat penambahan item kuisioner pada setiap variabel dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Jember sendiri yang didasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Ketiga, penelitian ini dilakukan secara menyeluruh kepada pegawai BPKAD dan OPD bagian akuntansi atau keuangan, berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyebar kuisioner kepada pegawai BPKAD. Keempat, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Bintang, Badung, Tangerang, dan kantor walikota Yogyakarta. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dengan adanya penelitian ini dapat menunjukkan seberapa penting pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Basis Akrual bagi laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki 31 kecamatan, 8 badan divisi, dan 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana setiap OPD memiliki fungsi dan tugas masing-masing, salah satunya Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) yang merupakan objek dari penelitian ini telah berhasil menyelesaikan hasil temuan BPK pada tahun 2019 secara tepat waktu, Kabupaten Jember telah menyelesaikan temuan atas kekurangan dan kelebihan bayar tahun anggaran 2019 kurang lebih sekitar 80% sudah terbayar pada tahun 2020, serta menganggarkan kekurangan pembayaran

pada tahun sebelumnya pada anggaran tahun 2020, serta temuan terkait penjurnalan pada masing masing OPD akan dibina dan diawasi secara langsung oleh pegawai BPKAD bidang akuntansi untuk tindak lanjut penyusunan Laporan keuangan 2020 (Feri, 2020).

Tujuan penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pentingnya pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Pengendalian Internal dan Pemahaman Akuntansi Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah pemahaman akuntansi basis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi basis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa sebagai acuan dan semangat mahasiswa khususnya akuntansi untuk lebih mengembangkan ilmu akuntansi di bidang pemerintahan dengan menggunakan variable implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) keuangan, pengendalian internal dan akuntansi basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang baik dan bagi peneliti dapat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana variable tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi Instansi pemerintah yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) keuangan, pengendalian internal dan pemahaman akuntansi basis akrual untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan undang undang standart akuntansi pemerintahan. Melihat kondisi laporan keuangan daerah dari tahun ke tahun belum mengalami perkembangan sehingga membuat peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian keuangan pemerintah di daerah tersebut.



## BAB 2 LANDASAN TEORI

### 2.1 *New Public Management*

*New Public Management (NPM)* adalah suatu sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management* (Denhardt, 2003). Dalam *New Public Management* manajer sektor publik didesak untuk mengarahkan dengan menentukan tujuan, apa yang harus dilakukan, dengan mengkatalisasi pemberian layanan, atau bagaimana itu harus dilakukan, melalui pilihan mereka dari suatu strategi atau kombinasi cara (misalnya memperbaiki pasar, peraturan, pajak, subsidi, asuransi dll) untuk mencapai tujuan. *New Public Management (NPM)* dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah *New Public Management (NPM)* secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern (Bryson et al., 2014).

Dasar dari NPM seperti yang dikemukakan Hood (1995) *New public management* berbaring membalikkan dua doktrin cardinal dari *Power Purchase Agreement (PPA)* yaitu menghilangkan perbedaan antara sektor publik dan swasta dengan menggeser penekanan yang tidak diperlukan menuju elemen yang lebih besar dengan berorientasi dalam hal hasil. Serta akuntansi dan kinerja yang menjadi elemen kunci keberhasilan. *New Public Manajemen* juga menekankan pendekatan ukuran seperti privatisasi, kinerja, pengukuran, perencanaan strategis, evaluasi dan pendekatan manajerial lainnya. Serta tujuan yang paling utama dari *new public management* adalah mengupayakan reformasi manajemen di pemerintahan Indonesia tidak hanya melalui pengenalan Teknik baru, tetapi melalui seperangkat nilai baru, khususnya nilai yang diambil dari sektor swasta dengan mendukung gagasan bahwa pemerintahan harus dijalankan seperti bisnis. Dalam Mathiasen (1999) mengidentifikasi lima atribut yang dapat digunakan NPM, yaitu:

1. Fokus yang lebih dekat pada hasil dalam hal efisien, efektivitas, dan kualitas layanan.
2. Penggantian struktur hierarki yang sangat tersentralisasi oleh lingkungan manajemen yang terdesentralisasi di mana keputusan tentang sumber daya alokasi dan pemberian layanan dibuat lebih dekat ke titik pengiriman.
3. Fleksibilitas untuk mengeksplorasi alternatif untuk mengarahkan ketentuan publik dan peraturan yang mungkin menghasilkan hasil kebijakan yang lebih hemat biaya.
4. Fokus yang lebih besar pada efisiensi dalam layanan yang diberikan langsung oleh sektor publik, yang melibatkan penetapan target produktivitas dan penciptaan lingkungan kompetitif di dalam dan di antara sektor organisasi.
5. Penguatan kapasitas strategis di pusat untuk memandu evolusi negara dan memungkinkan untuk merespon perubahan eksternal, internal serta beragam kepentingan secara otomatis fleksibel, dan setidaknya menekan biaya.

Ada perbedaan di antara pengamat NPM dalam menggunakan istilah Andrews (2004) menggunakannya untuk melambungkan adopsi sistem penganggaran berbasis kinerja. *New public management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Aspek yang ditargetkan pemerintah daerah melalui NPM tidak hanya peningkatan dibidang teknis tetapi juga bidang mendasar seperti budaya organisasi. Ruang lingkup NPM yang luas lalu beragam program dapat dilakukan dengan nama NPM. Anggaran pemerintah daerah dan perbaikan sistem akuntansi sebagai landasan penting di

Indonesia untuk mengubah pemerintah daerah, menjadi pemerintah yang lebih bertanggung jawab bagian yang tidak bias dan dipisahkan dari NPM. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Oktaviarni et al., 2019).

## **2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

### **2.2.1 Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. “Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna”. (James A Hall, 2007:9).

Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah sistem yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. SIM berfungsi mengelola transaksi, manajemen kontrol dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Secara konsep, informasi harus diolah dengan cepat, teliti, dan andal. Komputer merubah konsep tersebut menjadi nyata. Penggunaan komputer untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan bagi para manajer. Secara singkat sistem informasi merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan mulai dari mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. (Sugiyantari et al., 2018)

Menurut Gordon B.Davis (1996) dalam buku Sistem Informasi manajemen terdapat beberapa jenis sistem, sebagai berikut :

1. Sistem abstrak dan sistem fisik : Sistem abstrak merupakan susunan yang teratur dari gagasan yang satu dengan yang lainnya.
2. Sistem deterministik : Sistem ini merupakan yang beroperasi dan dapat menentukan hasil yang pasti.

3. Sistem probabilistik : Merupakan sistem yang beroperasi dan hasilnya juga belum pasti.
4. Sistem tertutup dan terbuka : Sistem tertutup ini sistem yang tidak mengalami pertukaran bahan, berbeda dengan sistem terbuka yang terjadi pertukaran bahan informasi dengan lingkungannya.

Sistem dalam suatu institusi pemerintah sangatlah penting, karena sistem sangatlah menunjang kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. SIM merupakan sebuah sistem yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. SIM berfungsi mengelola transaksi, manajemen kontrol dan system pendukung pengambilan keputusan. Secara konsep, informasi harus diolah dengan cepat, teliti, dan andal. Komputer merubah konsep tersebut menjadi nyata. Jamil (2016) berpendapat bahwa “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna.

### **2.2.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen**

Tugas dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen menurut (Gunadi, 2016) adalah:

#### **1. Tugas SIM**

##### **a. Pengumpulan Data**

Bagian pengumpul data bertugas untuk mengumpulkan data baik dari dalam maupun luar organisasi. Pihak dalam perusahaan yang menjalankan tugas ini diambil dari seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga setiap unit kerja terwakili dalam SIM.



b. Penyimpanan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya disimpan untuk segera diproses atau ditunda pemrosesannya, tergantung kebutuhan para manajer.

c. Pemrosesan Data

Pemrosesan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa ahli. Apabila datanya terlalu banyak, jasa dari tenaga-tenaga pengumpul dan insidental dapat dimanfaatkan, bagian inilah yang membuat data itu berubah bentuk menjadi informasi yang disesuaikan dengan permintaan manajer.

d. Pemrogram Data

Setiap komputer memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Agar komputer dapat melaksanakan tugasnya, maka perintah-perintah terhadap data yang terkumpul harus diubah terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang digunakan.

## 2. Fungsi SIM

- a) Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi.
- b) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c) Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- d) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
- e) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- f) Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
- g) Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- h) Mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka.
- i) Mengolah dokumen-dokumen transaksi yang terjadi.



### 2.2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Teknologi informasi ialah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. (Warsita, 2008:135) Aplikasi sistem informasi manajemen daerah adalah suatu sistem komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah. SIMDA adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan (Ikriyati & Aprila, 2019). Aplikasi ini dikembangkan dan dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA. Aplikasi SIMDA adalah salah satu sistem dari teknologi informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah dan provinsi di Indonesia dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya. Dengan adanya sistem informasi manajemen daerah dan penerapan SAP Daerah maka dalam pembuatan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan memiliki ketepatan waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan dapat digunakan. Adapun tujuan dari implementasi SIMDA yaitu

untuk memperoleh suatu laporan keuangan dan informasi keuangan dengan tepat waktu, komplit, akurat, dan dapat diandalkan serta sesuai dengan ketentuan yang ada (Ikriyati & Aprila, 2019).

Pengukuran terhadap kualitas sistem informasi dan yang dihasilkan oleh sistem informasi dan dampak penggunaan sistem informasi terhadap kepuasan penggunanya perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan memelihara keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja penggunanya agar pelaporan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. Produk yang merupakan hasil pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah Program Aplikasi SIMDA Keuangan, Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), Program Aplikasi SIMDA Gaji dan Program Aplikasi SIMDA Pendapatan. SIMDA Keuangan Cloud membuat pengelolaan keuangan bisa lebih efisien dan efektif. SIMDA Keuangan dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Data yang di input langsung terenkripsi sehingga aman dari sadapan dan real time yakni ketika pimpinan ingin melihat laporan, dapat langsung diakses dan memberikan informasi yang akurat (Pujiantoro, 2015).

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah :

- a. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) aplikasi SIMDA ini dikembangkan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi system informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya (Budiman Fuad & Arza Fefri Indra, 2013).

SIMDA dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/lembaga.

Output yang dihasilkan SIMDA keuangan adalah :

- a. Penganggaran
- b. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- c. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
- d. Surat Penyediaan Dana (SPD)
- e. Penatausahaan
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- g. Surat Perintah Membayar (SPM)
- h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- i. Surat Tanda Setoran (STS)

- j. Register
- k. Surat Pengendalian lainnya
- l. Akuntansi dan Pelaporan
- m. Jurnal
- n. Buku Besar
- o. Buku Pembantu
- p. Laporan Realisasi Anggaran
- q. Laporan Arus Kas
- r. Neraca

#### **2.4 Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi sendiri. Pengendalian berisi rencana organisasi dan metode yang akan digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. (Martini et al., 2019) pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh dewan komisaris atau manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara Sistem pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Aditya & Surjono, 2017).

Sementara dalam pemerintahan kewajiban tentang pengendalian internal di masing – masing entitas pelaporan dan akuntansi semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 yang secara eksplisit semakin dipertegas dengan terbitnya mengatur apa yang dinamakan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tersebut SPIP didefinisikan sebagai suatu system pengendalian internal yang dilakukan dan harus dipatuhi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan menyatu menjadi kegiatan dari instansi pemerintah, yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Internal.



Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian yang wajib diciptakan dan dipelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal adalah mewujudkan peran aparat pengawas internal pemerintah yang efisien dan efektif. Tujuan yang ingin dicapai dengan penerepan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan melakukan pengendalian internal ini diharapkan aparat pemerintah mampu bekerja secara ketaatan, kehematan, efektivitas dan efisiensi dengan mencapai tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah terutama terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

## **2.5 Pemahaman Akuntansi Basis Akrua**

Akuntansi menurut Niswonger (2009:6) adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Sementara itu akuntansi ialah sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi (Friska et al, 2015).

Akuntansi basis akrual menurut Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan. Namun akuntansi basis akrual menurut PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.



SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Komponen LKKL berbasis akrual adalah Neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut Arina, (2014:5) terdapat tujuan penggunaan basis akrual yaitu:

1. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem keuangan (panganggaran, akuntansi, dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
3. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
4. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian tujuan penerapan akuntansi basis akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan

Sementara itu manfaat diterapkannya Akuntansi Basis Akrual dalam Study No 14 yang diterbitkan oleh (*IFAC - International Federation of Accountants, 2003*) manfaat penggunaan basis akrual dapat diuraikan berikut ini. Laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.

2. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas. Pada level yang lebih detail, pelaporan dengan basis akrual.
3. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.
4. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya.
5. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.
6. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
7. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntansi akrual bagi pemerintah dapat memberikan gambaran yang utuh atas transaksi yang terjadi di dalam laporan keuangan selain itu dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

## **2.6 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban suatu perusahaan pada satu periode tertentu mengenai kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2015) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Tri & Nila, 2019).

Sementara itu menurut Meinarni et al, (2019:23) Laporan keuangan Pemerintah daerah adalah hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hasil suatu proses identifikasi dan pengukuran serta pencatatan seluruh transaksi ekonomi dalam nilai uang dari entitas akuntansi pada suatu pemerintahan. Laporan keuangan ini selanjutnya digunakan untuk memberikan informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya keuangan dan juga sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi yang berakhir pada suatu periode yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan keuangan tersebut dapat diketahui informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. PP No 71 Tahun 2010 mengatakan kualitas karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bisa memberikan kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bersifat informatif, relevan, sesuai, dan tepat waktu yang nantinya bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun para pemakai laporan keuangan tersebut di dalam suatu perusahaan/pemerintahan. C. Sopotan et al (2015) menyatakan lima tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut.

1. Sebagai petunjuk adanya kepatuhan pelaksanaan tugas
2. Laporan akuntabilitas dan alat evaluasi
3. Sebagai alat perencanaan
4. Petunjuk adanya kelanjutan organisasi
5. Sebagai alat publikasi.

Menurut Friska Angelo (2015) fungsi pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat memperkuat rumusan kerangka berpikir. Penelitian ini mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Daftar ringkasan penelitian terdahulu ini disajikan pada tabel berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

1. Try Ikyarti dan Nila Aprila (2019) Melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi System Informasi Manajemen Daerah, Dan System Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualotas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma“ variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah standard akuntansi pemerintah, system pengendalian internal, dan system informasi manajemen daerah sebagai variable independent, serta kualitas laporan keuangan daerah sebagai variable dependen. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan statistic analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa penerapan standard akuntansi pemerintahan, implementasi system informasi manajemen daerah dan system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten seluma.
2. Friska Langelo, et al (2015) Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas



masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

3. Ratna Wijayanti (2017) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena tingkat signifikan  $0,237 > 0,05$ . Sedangkan implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan tingkat signifikan  $0,000$ .
4. Ida Ayu Enny, et al (2016) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, System Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian internal, dan pemahaman atas regulasi system akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Aditya Sanjaya (2017) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, System Pengendalian Intern, System Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi” Hasil penelitian menunjukkan Hasilnya menunjukkan itu sistem akuntansi pemerintah, sistem kontrol internal, sistem akuntansi adalah pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan ke tingkat signifikansi  $<0,05$ . Sedangkan hasil sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan
6. Ismi desintha, et al (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Tandasrt Akuntansi Berbasis Akrual, System Pengendalian Internal Dan Penerapan System Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” hasil

penelitian menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, system pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

7. Meinarni Asnawi, et al (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi System Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (X1) memiliki 2.845 dengan tingkat signifikan 0,006, yang berarti penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah memiliki a pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara itu, variabel independen kualitas sumber daya manusia (X2) memiliki 3.084 dengan 0,003 tingkat signifikansi, hal ini menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia telah berdampak signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Selama, aplikasi standar akuntansi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan regional Kabupaten Pegunungan Bintang dengan tingkat signifikansi 3,454 dan 0,001. Selanjutnya, Variabel Sistem Kontrol Internal Pemerintah (X4) dengan nilai 2,487 dan tingkat signifikan 0,015, yang menunjukkan, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang.
8. Meisy Hendri dan Erinos NR (2020) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi System Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” hasil penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia, implementasi regional sistem informasi manajemen dan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

9. Sri Ayem dan Idham Husen (2017) Melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap berbasis akrual, simda, dan system pengendalian intern terhadap relevansi keuangan pemerintah daerah” hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Sumber Daya Manusia kompetensi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi pemerintah daerah laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pengaruhnya positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, dan Sistem Pengendalian Internal pengaruhnya positif dan signifikan pada relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Rama Ardiyanto (2019) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ringkasan daftar penelitian terdahulu adalah sebagai berikut

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu**

<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variable Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Try Ikyarti dan Nila Aprila (2019)	Implementasi System Informasi Manajemen Daerah, Dan System Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinntah Daerah Kabupaten Seluma	standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemn daerah , dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel independen, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen	Hasil menunjukkan bahwa penerapan standard akuntansi pemerintahan, implementasi system imformasi manajemen daerah dan system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten seluma.
Friska Langelo, et al (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Akuntansi basis akrual, standar akuntansi pemerintahan	pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, dan akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan walaupun

			terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji
Ratna Wijayanti (2017)	Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi Sdm, Dan Implementasi Akuntansi AkruaI, Kualitas Laporan Keuangan Daerah	kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena tingkat signifikan $0,237 > 0,05$ . Sedangkan implementasi akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan tingkat signifikan $0,000$ .
Ida Ayu Enny, et al (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, System Pengendalian Internal, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap	Sumber daya manusia, system pengendalian internal, akuntansi basis akruaI dan kualitas laporan keuangan daerah	kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian internal, dan pemahaman atas regulasi system akuntansi berbasis



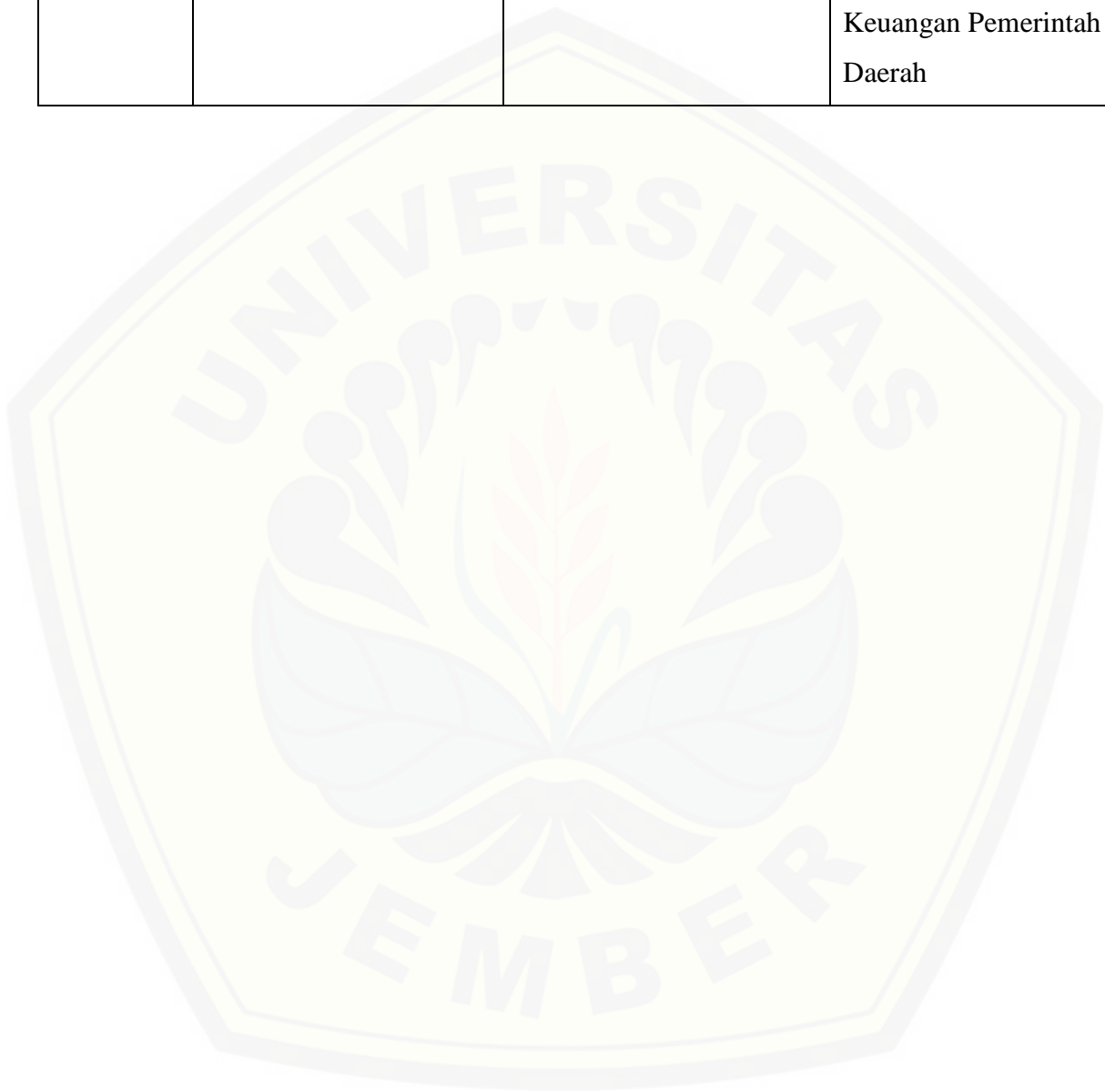
	Kualitas Laporan Keuangan Daerah		akrual dalam pemerintahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Aditya Sanjaya (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, System Pengendalian Intern, System Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi	System pengendalian intern, standard akuntansi pemerintahan, system akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan	Hasilnya menunjukkan itu sistem akuntansi pemerintah, sistem kontrol internal, sistem akuntansi adalah pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan ke tingkat signifikansi <0,05. Sedangkan hasil sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan
Ismi desintha, et al (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi standar Akuntansi Berbasis Akrual, System Pengendalian Internal Dan Penerapan System Manajemen Keuangan Daerah	Sumber daya manusia, standar akuntansi basis akrual, system pengendalian internal, system manajemen keuangan daerah dan kualitas lporan keuangan	bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh

	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan		terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, system pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Meinarni Asnawi, et al (2019)	Pengaruh Implementasi System Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	System informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), sumber daya manusia, standar pemerintahan, system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kualitas laporan keuangan	menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (X1) memiliki 2.845 dengan tingkat signifikan 0,006, kualitas sumber daya manusia (X2) memiliki 3.084 dengan 0,003 tingkat signifikansi, aplikasi standar akuntansi (X3)

			berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan dengan tingkat signifikansi 3,454 dan 0,001. Variabel Sistem Kontrol Internal Pemerintah (X4) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Meisy Hendri dan Erinos NR (2020)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi System Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sumber daya manusia, system informasi manajemen daerah, standar akuntansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan	menunjukkan kualitas sumber daya manusia, implementasi regional sistem informasi manajemen dan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sri Ayem dan Idham Husen (2017)	pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap berbasis akrual, simda, dan system pengendalian intern terhadap relevansi keuangan pemerintah daerah	Sumber daya manusia, system informasi manajemen daerah, standar akuntansi basis akrual, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan	menunjukkan Pengaruh Sumber Daya Manusia kompetensi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi pemerintah daerah laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis

			<p>akrual pengaruhnya positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, dan Sistem Pengendalian Internal pengaruhnya positif dan signifikan pada relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
<p>Rama Ardiyanto (2019)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan</p>	<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan</p>

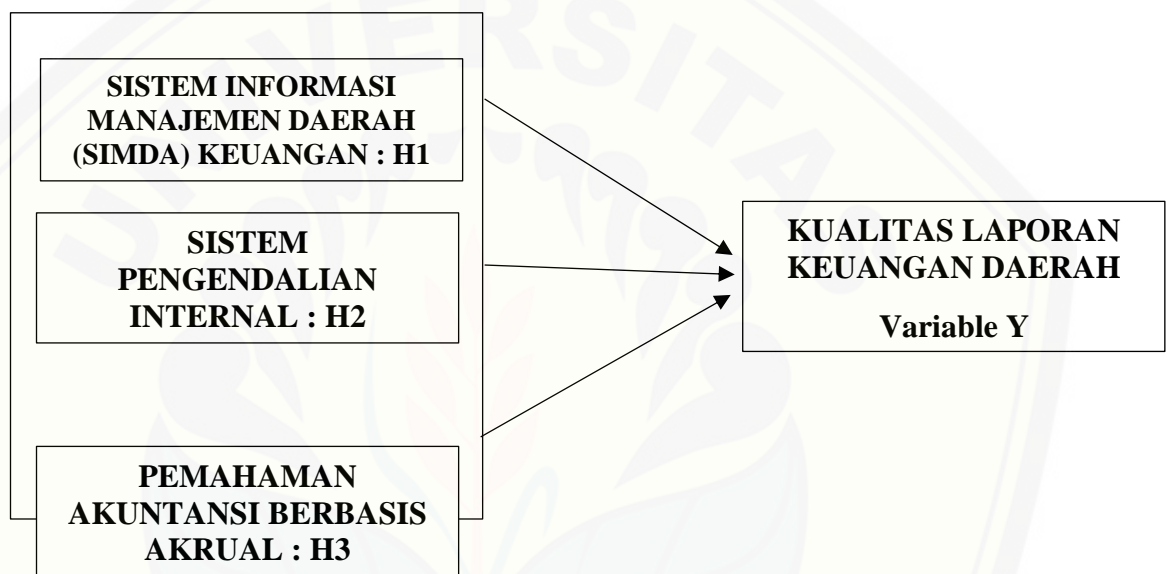
	Keuangan Pemerintah Daerah		Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
--	----------------------------	--	---





## 2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang menggambarkan bagaimana hubungan dengan faktor yang dianggap sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teroris mengenai variabel independen dan variable dependen. Berdasarkan landasan teori di atas, dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Skema Kerangka Konseptual

Keterangan :

1. Variabel Independen yaitu variable yang mempengaruhi variable lain, yaitu :  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN : H1,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL : H2, PEMAHAMN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL : H3
2. Variabel Dependen yaitu variable yang dipengaruhi oleh variable lain, yaitu :  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH Variable Y

## 2.9 Hipotesis Penelitian

### 2.9.1 HUBUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

*New Public Management (NPM)* adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management (Denhardt, 2003) *New Public Management* juga memberikan perubahan manajemen yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel. SIMDA merupakan perwujudan dari upaya penerapan NPM. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya sistem informasi manajemen daerah dan penerapan SAP, maka dalam pembuatan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan memiliki ketepatan waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat relevan dan diandalkan.

Menurut Try Ikyarti dan Nila Aprilia (2019) implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Serta menurut Meinarni Asnawi (2019) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh, yang berarti penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H1: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

### 2.9.2 HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pada teori *New Public Management*, menjelaskan bahwa suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat manajemen baru seperti *controlling* (Denhardt, 2003). Dalam *New Public Manajemen* menurut Bryson (2014) manajer sektor publik didesak untuk mengarahkan dengan menentukan tujuan, apa yang harus dilakukan, dengan mengkatalisasi pemberian layanan, atau bagaiman itu harus dilakukan, melalui pilihan mereka dari suatu strategi atau kombinasi cara (misalnya memperbaiki pasar, peraturan, pajak, subsidi, asuransi dll) untuk mencapai tujuan. Disini upaya pemerintah dalam menerapkan NPM dalam pengendalian internal pemerintahan dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang pengendalian intern pemerintah yang berisi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan dan harus dipatuhi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya pengendalian internal diharapkan pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, karena pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidak abasahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara melakukan mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga menyajikan laporan kuangan serta penyajian laporan keuangan akan memiliki ketepatan waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat relevan dan diandalkan.

Menurut Ismi Desintha (2017) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap laporan keuangan. Sementara menurut Sry Ayem dan Idham Husen (2017)

Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

### **2.9.3 HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL DENGAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Pada teori *New Public Management* seperti yang dikemukakan C. Hood (1995) bahwa elemen kunci dari penerapan *New Public Management* adalah akuntansi dan kinerja. perbaikan sistem akuntansi sebagai landasan penting di Indonesia untuk mengubah pemerintah daerah, menjadi pemerintah yang lebih bertanggung jawab oleh karena itu pemerintah mencoba memperbaiki sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan yang awalnya berlandaskan basis kas menjadi basis akrual yang lebih modern dan terstruktur yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Dengan adanya Akuntansi Basis akrual yang berlandaskan PP No. 71 tahun 2010 diharapkan pemerintah bertanggung jawab dalam aktivitas pembuatan laporan keuangan yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah, karena akuntansi basis akrual merupakan dasar dari pembuatan dan pelaporan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan oleh karena itu pemerintah harus memahami standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga menyajikan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan memiliki ketepatan waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat relevan dan diandalkan.

Menurut Friska Langelo (2015) akuntansi basis akrual berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan. Menurut Ida Ayu (2016) akuntansi basis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Serta

menurut Ismi desintha (2017) akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap laporan keuangan.

H3: Pemahaman Akuntansi Basis Akrual Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah





## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat kuantitatif dan membatasi permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, kemudian peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa rancangan peneliti yang tepat harus spesifik, jelas, terperinci, serta dapat ditentukan secara tepat sejak awal sehingga setiap langkah penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman. Rancangan penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (X1, X2, dan X3) yang meliputi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan, pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi berbasis akrual. Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:119). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Sampel menurut Sugiyono (2014) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini terdiri dari entitas akuntansi atau keuangan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, yang akan dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah BPKAD dan pegawai OPD dinas dan kecamatan bagian akuntansi atau keuangan sejumlah 31 kecamatan, 8 badan divisi, dan 34 OPD. Dalam BPKAD ada 50 orang pegawai yang akan diberikan kuisisioner sementara untuk kecamatan, badan dan OPD akan ada 1 staf akuntansi atau keuangan yang akan mengisi kuisisioner tersebut. Tiap pegawai ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria

tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini meliputi pegawai bagian akuntansi atau keuangan yang bekerja lebih dari satu tahun, pegawai yang telah menggunakan aplikasi SIMDA lebih dari satu tahun, dan turut serta dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Jember.

### 3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (angket) kepada objek yang akan diteliti.

kuantitatif melalui skoring dengan pengukuran skala likert. Hal ini dilakukan guna mengakomodir alat analisis yang akan dilakukan, yaitu alat analisis statistik dengan model analisis linear berganda. Adapun data penunjang sebagai bahan untuk pembahasan dan data gambaran umum obyek penelitian adalah data kuantitatif

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan penyebaran daftar pertanyaan berupa angket yang akan diberikan kepada responden. Teknik pengumpulan data kuesioner ini dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik pengumpulan data kuesioner ini akan efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti mengenai variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan responden dengan cara mendatangi satu persatu calon responden, dikarenakan penelitian ini dilakukan se-Kabupaten Jember maka dibantu dengan menyebarkan kuesioner secara online dengan menggunakan google form atau share link serta pemberian lembar pertanyaan secara langsung kepada responden. Kuesioner ini menggunakan skala likert (*likert scale*) dengan skor 1-5. Skala likert merupakan metode untuk mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014:104). Penilaian dalam kuesioner sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. TP : Tidak Pasti (Ragu-ragu)
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

**Gambar 3.1**

**Skala Likert**

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Pasti (Ragu-ragu)	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

*Sumber: Sugiyono, 2014*

### 3.3 Definisi Variabel Operasional dan Skala Pengukurannya

#### 3.3.1 Definisi Variabel Operasional

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus diterapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Definisi variabel penelitian adalah atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur onstrak atau variabel tertentu. Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut dapat diukur (Pusparani, 2017).

Sesuai dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan, Pengendalian Internal, dan Pemahaman Akuntansi Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, maka penulis mengelompokkan variabel dalam judul tersebut dalam dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas (Independent variable) (X)

## 2. Variabel Terikat (Dependent Variable) (Y)

### 1. Variabel Terikat (Dependent Variable) (Y)

Menurut sugiyono (2016) definisi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel dependen dari penelitian ini adalah:

#### a. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan yang sesuai kriteria akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Alat ukur kualitas laporan keuangan terdiri dari beberapa indikator diantaranya, relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Nugroho dan Kusumawaty, 2018). Pengukuran tersebut menggunakan angket yang berupa pertanyaan dengan lima pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju.

### 2. Variabel bebas (Independent variable) (X)

Menurut Sugiyono (2015:39) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yang diteliti diantaranya:

#### a. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi manajemen daerah, pemerintah daerah wajib dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi didalam meningkatkan kemampuan dan dapat mengelola keuangan dan meningkatkan kinerja dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Dengan alat ukur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terdiri dari beberapa indikator diantaranya, perangkat yang digunakan, jaringan yang dipakai dan pengolahan data keuangan menggunakan aplikasi simda keuangan (Zuliatun, 2017). Pengukuran tersebut menggunakan angket

yang berupa pertanyaan dengan lima pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju.

#### **b. Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu sistem yang memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)*, implementasi Peraturan Pemerintah No. 60, dokumen dan catatan yang memadai, pemisahan wewenang dan tindakan disiplin atas pelanggaran. Dengan alat ukur Pengendalian Internal keuangan terdiri dari beberapa indikator diantaranya, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi (Sudirianti, 2015). Pengukuran tersebut menggunakan angket yang berupa pertanyaan dengan lima pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju.

#### **c. Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua**

Dalam menerapkan PP No.71 tahun 2010 dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) (Permendagri No. 64, 2013) tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang mengharuskan penerapan SAP Berbasis Akrua pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun 2015, Pemerintah Kota Bitung menyadari sepenuhnya bahwa penerapan SAP dalam menyajikan laporan keuangan di setiap kementerian/lembaga maupun daerah sangat wajib segera dilaksanakan. Adanya audit yang akan dilakukan oleh BPK berperan terhadap opini yang akan diberikan BPK atas laporan keuangan. Dasar BPK melakukan audit adalah SAP, sehingga penyusunan laporan keuangan harus berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas. Dengan alat ukur Akuntansi Berbasis Akrua terdiri dari beberapa indikator diantaranya, penerapan PP No. 71 Tahun 2010, Kesiapan SDM, Kualitas Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi dalam penerapan Akuntansi Basis Akrua (Setiawati, 2013). Pengukuran tersebut menggunakan angket yang berupa pertanyaan dengan lima pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju.



### 3.4 Analisis Data

#### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif menggambarkan berupa rata-rata, median, modus, dispersi dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Pengujian ini untuk melihat gambaran sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan penelitian. Hal pertama yang harus dilakukan dalam setiap uji dalam penelitian adalah dengan melakukan deskripsi terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Dengan demikian, akan terlihat gambaran data secara umum yang dapat digunakan menjadi pertimbangan awal dalam sebuah kesimpulan terhadap hipotesis penelitian. Dalam melakukan uji deskriptif variabel penelitian atau biasa disebut dengan uji statistik deskriptif, perlu beberapa indikator untuk menggambarkan hasil uji penelitian tersebut (Indriantoro dan Supomo, 1999: 170)

#### 3.4.2 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kuesioner, maka kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang paling penting dalam penelitian ini. Selain itu, keabsahan hasil penelitian juga ditentukan oleh alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Apabila terjadi ketidak validan dalam proses pengumpulan data maka tidak dapat dipercaya dan hasilnya tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Maka, alat pengukur dalam penelitian ini harus di uji menggunakan uji validitas dan uji realibilitas.

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas di definisikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu alat tes melakukan fungsi ukurannya. Model pengujian ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation untuk menguji validitas pernyataan kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur untuk kuesioner tersebut. Uji validitas data menguji seberapa baik suatu perangkat instrument diukur dengan tepat. Validitas ditentukan dengan mengkorelasikan skor masing-masing item. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid tidaknya suatu data adalah jika r-hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari r-table (nilai kritis) maka dapat dikatakan valid. Selain itu, jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka instrument dapat dikatakan valid (Ghozali, 2016).

## 2. Uji Reliabilitas

Apabila validitas telah diperoleh, maka peneliti harus mempertimbangkan pengukuran reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah dalam hal ini kuisisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel. Suatu kuisisioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan beberapa kali. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung crombach alpha masing-masing item dengan bantuan IBM SPSS versi 23. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha positif dan lebih besar dari 0,70. Dimana semakin besar nilai alpha, maka alat pengukur yang digunakan semakin handal (Ghozali, 2016).

### 3.5 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis linier berganda sebelum melakukan uji hipotesis yaitu dengan uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah dapat memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

### 3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Analisis grafik dan uji statistik merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:10). Pada penelitian ini uji asumsi normalitas menggunakan analisis grafik dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dan uji statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan untuk asumsi normalitas Antara lain:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan, dalam uji statistic Kolmogorov-Sminorv, penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikan hasil hitung. Dasar pengambilan keputusannya, antara lain:

1. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### 3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam regresi pada penelitian ini, dapat dilihat nilai *Varians Inflation Factor (VIF)*. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas ketika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memiliki masalah multikolinieritas (Ghozali, 2016:103).

### 3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah menggunakan grafik plot.

Uji plot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPERD dengan residualnya SRESID. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada plot yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2016:134).

### 3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independent (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif dan negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Berdasarkan model penelitian di atas, maka persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Pengendalian Internal

$\beta_3$  = Koefisien Regresi Pemahaman Akuntansi Basis Akrua

$X_1$  = Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan



$X_2$  = Variabel Pengendalian Internal

$X_3$  = Variabel Pemahaman Akuntansi Basis Akrua

$e$  = Error

### 3.7 Uji Hipotesis

Setelah melewati semua pengujian asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian atas hipotesis, Uji hipotesis berguna untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual, hasil pengujian atas hipotesis akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan hubungan antara variabel dependen dan independen. Terdapat tiga pengujian yang akan dilakukan pada tahapan ini, yaitu:

#### 3.7.1 Uji F

Pada analisis regresi, Uji F harus dilakukan untuk menguji kelayakan model. Selain itu, Uji F dilakukan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika  $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$  berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan  $(\alpha)$  untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau  $(\alpha) = 0,05$ .

#### 3.7.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian  $R^2$  digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Ghozali (2016:95) mengatakan apabila  $R^2$  sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan apabila  $R^2$  semakin kecil atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. Apabila  $R^2$  semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

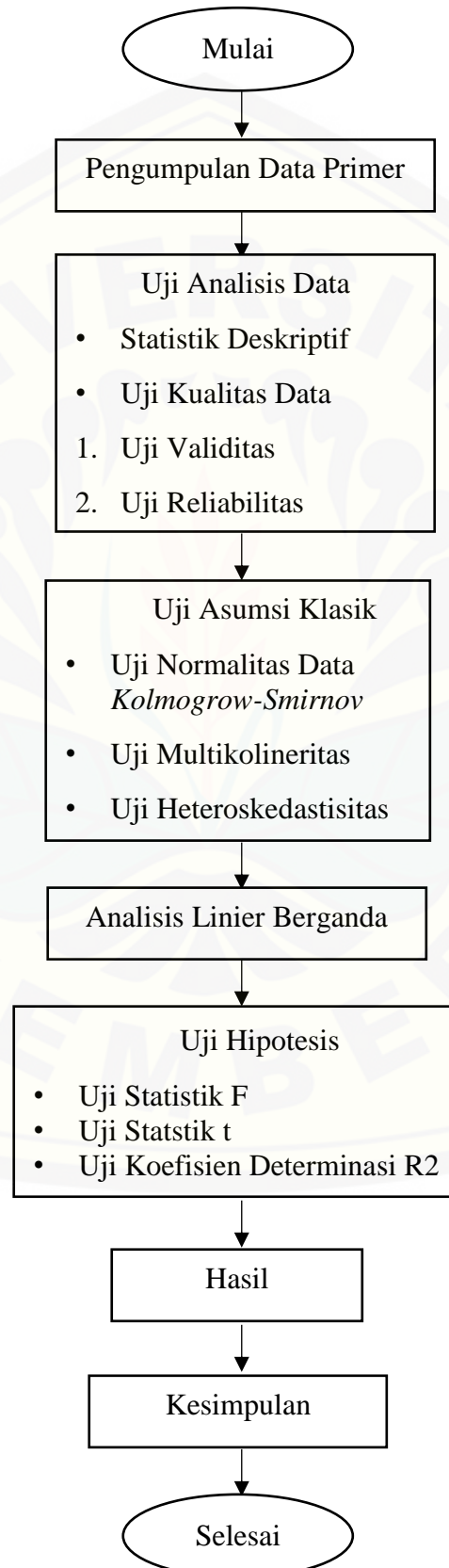
### 3.7.3 Uji t

Uji t dalam analisa regresi linier berganda memiliki maksud untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Pengujian pada uji hipotesis secara parsial ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi  $t < 0,05$ , maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi  $t > 0,05$ , maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh Pemahaman Akuntansi Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pemahaman Akuntansi Basis AkruaI maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### 5.2 Keterbatasan

1. Banyaknya agenda kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember sehingga proses penyebaran kuisisioner membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
2. Pada penelitian ini, hanya menggunakan sampel pada Badan Pengelolah Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah bagian akuntansi atau keuangan sehingga tidak memperoleh sampel yang menyeluruh.
3. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menguji 3 variabel independen, akan tetapi masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### 5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan koordinasi sebelum melakukan penyebaran kuisioner sehingga responden yang dituju berada ditempat.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah sampel diluar bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menguji variabel lain yang berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4. Bagi penelitian selanjutnya dihrapkan untuk menguji dengan menggunakan metode kualitatif atau *mix method* yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yang diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Arina, Devi dkk, 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua Seminar Akuntansi Permerintah STAN
- Ardianto, Rama (2019), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Wilayah Kabupaten Tangerang), *Jurnal Bina Akuntansi, Januari 2019, Vol.6 No.1 Hal 95 - 136*
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Budiman Fuad, & Arza Fefri Indra. (2013). Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 87–110. <http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/2315>
- Basukianto, Febrian Cahyo Pradono. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Hal*, 2015, 188-200.
- BPK,2019.[https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2020/BUKU\\_SAKU\\_2019-1.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2020/BUKU_SAKU_2019-1.pdf)
- BPK,2020.<https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3–10. <https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013>
- Egit Gunadi, (2016). pengaruh penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (simda)terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten gowa (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten gowa)
- Ekatama, Nugraha (2017). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua , Pemanfaatan Teknologi Informasi ,.*

- Gordon B. Davis, Margrethe H. Olson. (1984). *Management information systems : conceptual foundations, structure and development. United States: McGraw-Hill Education – Europe.*
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hood, C. (1995). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Hall, James A., “Accounting Information System.”. Edisi Empat. Buku Dua, jakarta: Penerbit Salemba Empat, tahun (2007).
- IFAC - International Federation of Accountants. (2003). *Transition to the Accrual Basis of Accounting : Guidance for Governments and Government Entities* (Issue December).
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Indonesia, P. P. R. (2006). Government Regulation No. 8 year 2006 Concerning Financial Reporting and Performance of Government Agencies. <https://www.Ut.Ac.Id/En/Node/515>. <https://www.ut.ac.id/en/node/515>
- Indonesia, P. R. (1992). *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 24115(3501).*
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004*. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indriyanto, N., & Supomo, B. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Manajemen dan Akuntansi. *BPFE, Yogyakarta.*
- Jamil, M., Rosihan., dan A. Fuad. 2016. Cloud Computing, Teori dan Aplikasi Yogyakarta. Deepublish.
- Jatimnet, 2019. <https://jatimnet.com/bpk-minta-pemprov-jatim-merapikan-monitoring-dana-bos>
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8.

<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(1).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar file:///D:/JurnalJAMALkoe/Rev4-ok/jurnalMendeley/2000-3523-1-SM (4).pdf* Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 8.

Niswonger, Rollin. 2009. Prinsip-Prinsip. Akuntansi (Edisi ke-19). Jakarta: Salemba Empat.

Oktaviarni, F., Murni, Y., & Suprayitno, B. (2019). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.1-16>

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.

Peraturan Bupati Jember Indonesia, P. R. (2014). *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. 24115(3501), 1–8.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/873.bpkp>

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-56-tahun-2005-tentang-sistem-informasi-keuangan-daerah/--232-267-PP56\\_2005.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-56-tahun-2005-tentang-sistem-informasi-keuangan-daerah/--232-267-PP56_2005.pdf)

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008\\_SPIP.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf)

Pengendalian, S., & Dan, I. (2017). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual, Pemanfaatan Teknologi Informasi*, .

Prameswari, M. (2016). *Adln-perpustakaan universitas airlangga*. 51–87.

Pujiantoro, Hadi. 2015. Kelola APBD Berbasis “Cloud System” ala Pemkab Jember. <http://korankabar.com/kelola-apbd-berbasis-clouds-system-a-la-pemkabjember/> (diakses pada 15 Nopember 2016)

Pustaka, K., Pemikiran, K., & Hipotesis, D. a N. (2004). *Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis*. i, 16–45.

- SetiawatiR,(2013).<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2182/Ririz%20Sstiawati%20Kusuma%20%20090810301007.pdf?sequence=1>
- Septo Nugroho, B., & MM, A. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sugiyono, (2016), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, alfabeta, Jakarta.
- Sudiarianti, Ni Made, dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan 14 Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.
- Sugiyantari, D., Titisari, P., & Sumani, S. (2018). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Cloud Pada Pemerintah Kabupaten Jember. *Bisma*, 12(1), 106. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7607>
- KabupatenJember.*Bisma*,12(1),106.<https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7607>
- Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Zuliatun. (2017). <http://eprints.umpo.ac.id/3144/8/LAMPIRAN.pdf>



## LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
A	Relevan					
1.	Laporan keuangan daerah yang disusun sesuai SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan					
2.	Laporan keuangan daerah yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu ( <i>feedback value</i> )					
B	Andal					
3.	Laporan keuangan daerah disajikan secara lengkap dan mencakup seluruh informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan teruji kebenarannya					
4.	Laporan keuangan daerah disajikan sesuai fakta, diolah sesuai prosedur dan tidak mengandung pengertian yang menyesatkan					
5.	Laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya					



C	Dapat Dibandingkan					
6.	Laporan keuangan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan daerah periode sebelumnya					
7	Laporan keuangan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain sejenis					
D	Dapat Dipahami					
8	Penyajian laporan keuangan mengandung informasi yang jelas dan dapat dipahami pengguna					
9	Penyajian laporan keuangan dinyatakan sesuai bentuk dan istilah yang dapat dipahami pengguna					

Sumber: Nugroho dan kusumawaty, 2018

**Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
A	Perangkat					
1.	Telah tersedia perangkat komputer yang memadai pada Subbagian akuntansi/keuangan					
2.	Terdapat Aplikasi SIMDA keuangan yang mendukung proses akuntansi hingga pelaporan keuangan					
3.	Penggunaan aplikasi SIMDA dapat dijalankan dengan mudah					
B	Jaringan					
4.	jaringan internet yang terpasang di unit kerja memiliki sinyal yang stabil untuk menunjang input data keuangan					
5.	Adanya pemanfaatan jaringan internet dalam menghubungkan antar unit kerja untuk pengiriman data dan informasi					
C	Pengelolaan data keuangan					
6.	Prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan benar dan cermat pada pengelolaan data di aplikasi SIMDA					
7.	Penggunaan aplikasi SIMDA untuk mengelola data keuangan sesuai dengan Undang Undang					
8.	SIMDA keuangan menghasilkan laporan triwulanan, bulanan, dan tahunan					
9.	Penggunaan SIMDA pada instansi anda meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan					

Sumber : Zuliaturun, 2017

**Pengendalian Internal**

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
A	Lingkungan Pengendalian					
1.	Catatan akuntansi selalu diperiksa oleh pimpinan untuk menilai kualitas pengendalian internal					
2.	Adanya Standart kompetensi pada setiap tugas dan fungsi dalam setiap posisi di instansi					
3.	Adanya temuan atau rekomendasi dari BPK/Inspektorat akan ditindak lanjuti sebagai bagian dari penilaian kualitas pengendalian internal					
B	Penilaian Resiko					
4.	Analisis resiko telah dilakukan oleh pimpinan untuk menilai timbulnya pelanggaran pada sistem akuntansi					
5.	Pimpinan telah membuat rencana pengelolaan atau pengurangan resiko pelanggaran akuntansi					
C	Aktivitas Pengendalian					
6.	Adanya prosedur dan kebijakan pengamanan fisik atas aset, dan dokumentasi transaksi pada instansi					
7.	Adanya pengembangan rencana untuk identifikasi serta pengamanan pada aset dan transaksi					
D	Informasi dan Komunikasi					
8.	Informasi tersedia tepat waktu dan digunakan secara efektif					
9.	Surat pertanggungjawaban disampaikan oleh pengguna anggaran atau pemegang kas tepat waktu					

Sumber: Sudiarianti, 2015

### Pemahaman Akuntansi Basis Akrual

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
A.	Penerapan PP No. 71 Tahun 2010					
1.	Anda memahami SAP 2010 berbasis akrual pada pelaporan keuangan instansi pemerintah					
2.	Anda memahami bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui serta dicatat saat terjadi transaksi sesuai ketentuan pencatatan Akuntansi Basis Akrual					
3.	Anda memahami dan dapat menyediakan informasi mengenai cara entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya					
B.	Kesiapan SDM					
4.	Anda menguasai akuntansi pemerintahan dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan					
5.	Anda memiliki kemampuan untuk melaksanakan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah					
C.	Kualitas Teknologi Informasi					
6.	Pemerintah daerah mempunyai Platform/sistem pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana jangka Menengah maupun jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas, yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang keuangan					
7.	Pemerintah didukung oleh Sistem Manajemen Informasi yang dilaksanakan secara cermat dan					





15	5	4	5	4	4	5	5	5	5	42	5	5	5	5	5	5	5	5	45
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	3	3	3	4	4	4	4	4	33	4	3	3	4	4	4	4	4	34
19	2	4	4	1	5	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	5	5	5	3	4	5	4	5	4	40	4	4	4	4	4	4	4	5	37
21	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	5	4	4	4	4	4	4	4	37
24	4	4	4	2	4	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	2	34
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	5	5	4	4	4	4	4	38
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35	4	4	5	4	4	5	4	4	39
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	4	4	4	4	4	5	4	4	37
29	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	4	4	4	4	5	4	4	4	37
30	5	4	5	4	5	4	4	5	4	40	5	5	4	5	4	4	5	5	41
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	5	5	4	4	4	38
32	3	4	4	4	3	4	4	4	3	33	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	4	3	4	3	4	3	3	4	4	32	3	3	4	4	4	3	3	3	31
34	5	5	4	5	5	5	5	4	4	42	4	4	4	4	5	5	4	4	38
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	2	2	3	3	4	3	2	2	24
36	5	5	4	5	5	5	5	4	4	42	4	4	4	4	5	5	4	4	38
37	5	5	4	5	5	5	5	4	4	42	4	4	4	4	5	5	4	4	38
38	5	5	4	2	5	5	5	4	4	39	4	4	4	4	5	5	4	4	38
39	5	5	4	2	5	5	5	4	4	39	4	4	4	4	5	5	4	4	38
40	5	5	2	2	4	3	3	4	2	30	4	4	4	4	5	3	4	4	36
41	5	5	4	5	4	3	3	4	2	35	4	4	4	4	5	3	4	4	36
42	4	5	2	5	4	5	5	3	5	38	4	4	3	5	4	5	4	4	36
43	4	3	4	3	4	3	3	4	3	31	4	4	4	4	4	3	4	4	35
44	5	3	5	3	4	3	3	5	2	33	4	4	5	5	5	3	4	4	39
45	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	5	4	2	4	2	3	3	3	4	30	4	4	3	4	5	3	4	4	34
47	4	4	2	4	2	4	4	4	4	32	4	4	5	4	5	4	5	4	37
48	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34	3	3	4	4	4	4	4	4	34
49	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38	5	5	5	5	5	4	5	4	42
50	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	34
51	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	2	4	2	4	4	4	4	4	32

52	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	36
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2	4	2	4	4	4	4	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3	3	3	4	4	4	4	4	33
55	5	5	4	5	4	4	4	3	4	38	2	4	3	4	4	4	4	4	33
56	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	2	4	4	4	4	4	34
57	5	5	5	5	5	5	5	5	3	43	2	2	5	4	4	5	4	5	36
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	5	4	5	4	5	4	4	5	4	40	5	4	5	4	5	4	5	4	41
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	2	2	5	4	4	4	4	33
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	27
62	4	3	3	3	4	3	3	4	3	30	4	3	3	3	4	3	4	3	31
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	2	2	4	4	4	4	4	32
64	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	4	4	4	5	4	4	4	4	37
65	4	5	5	5	5	5	5	4	5	43	4	5	5	5	5	5	5	5	44
66	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	4	4	4	2	4	4	4	4	34
67	3	4	3	4	3	5	4	3	4	33	4	4	4	3	4	4	4	4	34
68	5	4	4	4	4	2	5	2	2	32	4	5	5	2	2	5	2	5	34
69	5	4	5	4	5	5	4	3	3	38	4	4	4	3	3	4	3	4	34
70	5	4	5	4	5	2	3	5	4	37	3	4	3	5	4	3	4	3	34
71	4	5	4	5	4	4	4	2	2	34	5	4	4	2	2	4	2	4	31
72	5	4	4	4	2	2	5	3	3	32	5	4	5	3	3	5	3	5	35
73	3	4	5	4	5	2	4	3	4	34	5	4	5	2	2	4	2	4	33
74	3	3	4	3	4	2	4	2	3	28	4	5	4	3	3	4	3	4	34
75	3	5	5	5	5	2	4	3	2	34	5	4	4	3	3	4	3	4	35
76	5	3	5	3	5	2	5	5	3	36	3	4	5	3	3	5	3	5	36
77	4	3	3	3	3	4	4	3	3	30	3	3	4	4	3	4	3	4	31
78	4	5	3	5	3	3	4	5	3	35	3	5	5	4	5	4	5	4	38
79	3	4	3	4	3	4	3	4	3	31	5	3	5	3	4	3	4	3	33
80	3	3	4	3	4	3	3	3	4	30	3	3	4	3	3	3	3	3	29
81	3	4	3	4	3	3	3	4	3	30	3	4	3	3	4	3	4	3	30
82	3	5	3	5	3	3	3	5	3	33	3	5	3	3	5	3	5	3	33
83	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29	4	3	3	4	3	4	3	4	31
84	4	4	3	4	3	4	4	4	3	33	4	4	3	4	4	4	4	4	34
85	3	3	5	3	5	4	3	3	5	34	3	3	5	3	3	3	3	3	31
86	3	4	3	4	3	3	3	4	3	30	3	4	3	3	4	3	4	3	30
87	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29	4	3	3	4	3	4	3	4	31
88	4	4	3	4	3	4	4	4	3	33	4	4	3	4	4	4	4	4	34

89	3	3	5	3	5	4	4	3	5	35	3	3	5	3	3	4	3	4	5	33
90	3	4	3	4	3	3	4	4	3	31	3	4	3	3	4	4	4	4	3	32
91	3	4	3	4	4	3	4	4	3	32	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
93	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	4	2	4	4	4	4	4	4	3	33
94	3	4	4	4	5	4	3	4	4	35	4	3	4	4	5	3	5	3	5	36
95	5	4	5	4	4	4	5	4	5	40	5	3	4	5	4	5	4	5	4	39
96	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	4	3	4	5	5	4	5	4	3	37
97	3	4	4	3	4	3	2	4	4	31	4	3	4	4	4	2	4	2	4	31
98	4	3	4	5	5	5	4	3	4	37	3	2	4	4	4	4	4	4	5	34
99	5	5	4	3	3	3	2	5	4	34	4	3	4	4	5	2	5	2	3	32
100	3	3	3	5	5	5	3	3	3	33	2	2	3	3	4	3	4	3	5	29
101	5	5	4	5	5	5	2	5	4	40	4	3	4	4	5	2	5	2	5	34
102	5	5	4	2	5	5	4	4	3	37	4	3	4	4	5	4	5	4	5	38
103	5	5	4	2	5	5	2	4	3	35	4	3	4	4	5	2	5	2	5	34
104	5	5	4	2	4	3	5	4	3	35	4	3	4	4	5	5	5	5	4	39
105	5	5	4	5	4	3	5	4	3	38	4	3	4	4	5	5	5	5	4	39
106	5	5	4	5	4	5	5	4	5	42	4	3	4	4	5	5	5	4	5	39
107	4	4	4	3	4	3	3	4	4	33	4	4	5	4	4	3	5	4	3	36
108	4	4	4	3	4	3	3	4	4	33	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34
109	3	4	4	4	2	4	4	4	4	33	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
110	5	4	5	4	2	3	4	5	5	37	5	5	4	5	4	4	4	5	4	40
111	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34	4	4	4	5	5	4	4	5	4	39
112	3	4	4	4	4	2	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

No	Pemahaman Akuntansi Basis Akrua (X3)									Total	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)									Total
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	5	4	4	4	4	5	4	5	4	39
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	2	5	4	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	5	4	5	5	39

8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39	5	5	4	5	5	2	5	5	5	41
11	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	5	4	4	5	5	2	4	5	5	39
12	5	5	4	4	4	5	5	5	5	42	4	5	5	4	4	5	4	5	4	40
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	3	4	4	3	3	3	3	4	4	31	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	5	4	4	5	5	5	5	5	5	43
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
19	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	5	5	4	5	39
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
26	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
27	4	5	3	4	4	4	5	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
28	4	5	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
29	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
30	4	4	4	5	5	5	4	5	4	40	4	5	5	5	4	4	5	5	4	41
31	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38	4	5	4	3	4	4	4	4	4	36
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
33	4	3	3	3	3	3	4	4	4	31	3	4	3	5	4	3	3	3	4	32
34	4	5	5	4	4	4	4	4	5	39	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
35	5	3	3	2	2	2	3	3	4	27	3	3	2	3	3	3	2	2	3	24
36	4	5	5	4	4	4	4	4	5	39	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
37	4	5	5	4	4	4	4	4	5	39	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
38	4	5	5	4	4	4	4	4	5	39	5	4	4	4	4	2	4	4	4	35
39	4	5	5	4	4	4	4	4	5	39	5	4	4	4	4	2	4	4	4	35
40	4	3	3	4	4	4	4	4	5	35	3	4	4	4	4	2	4	4	4	33
41	4	3	3	4	4	4	4	4	5	35	3	4	4	4	4	5	4	4	4	36
42	3	5	5	4	4	4	3	5	4	37	5	5	4	4	5	5	4	4	3	39
43	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
44	5	3	3	4	4	4	5	5	5	38	3	5	4	5	5	3	4	4	5	38

45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	3	3	3	4	4	4	3	4	5	33	3	4	4	5	4	4	4	4	35
47	2	4	4	4	4	4	5	4	5	36	4	4	4	5	4	4	5	4	36
48	4	4	2	4	3	3	4	4	4	32	4	4	3	4	4	4	4	4	35
49	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	4	5	5	5	5	4	5	4	41
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	34
51	4	4	4	4	2	4	2	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	36
53	4	4	4	4	2	4	2	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	36
54	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33	4	4	3	4	4	4	4	4	35
55	4	4	4	4	2	4	3	4	4	33	4	4	4	4	4	5	4	4	37
56	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34	4	4	4	4	4	4	4	4	36
57	5	5	5	5	2	2	5	4	4	37	5	4	2	4	4	5	4	5	38
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	4	4	4	4	5	4	5	4	5	39	4	4	4	4	4	4	5	4	38
60	4	4	4	4	4	2	2	5	4	33	4	5	2	4	5	4	4	4	36
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	27
62	3	3	3	3	4	3	3	3	4	29	3	3	3	3	3	3	4	3	29
63	4	4	4	4	4	2	2	4	4	32	4	4	2	4	4	4	4	4	34
64	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38	4	5	4	4	5	4	4	4	38
65	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44	5	5	5	5	5	5	5	5	45
66	4	4	5	4	4	4	4	2	4	35	4	2	4	4	2	4	4	4	32
67	4	4	5	4	4	4	4	3	4	36	4	3	4	3	3	4	4	4	32
68	5	5	2	5	4	5	5	2	2	35	5	2	5	4	2	4	2	5	33
69	4	4	5	4	4	4	4	3	3	35	4	3	4	5	3	4	3	4	35
70	3	3	2	3	3	4	3	5	4	30	3	5	4	5	5	4	4	3	38
71	4	4	4	4	5	4	4	2	2	33	4	2	4	4	2	5	2	4	31
72	5	5	2	5	5	4	5	3	3	37	5	3	4	4	3	4	3	5	33
73	4	4	2	4	5	4	5	2	2	32	4	2	4	5	2	4	2	4	32
74	4	4	2	4	4	5	4	3	3	33	4	3	5	4	3	3	3	4	33
75	4	4	2	4	5	4	4	3	3	33	4	3	4	5	3	5	3	4	36
76	5	5	2	5	3	4	5	3	3	35	5	3	4	5	3	3	3	5	36
77	4	4	4	4	3	3	4	4	3	33	4	4	3	3	4	3	3	4	31
78	4	4	3	4	3	5	5	4	5	37	4	4	5	3	4	5	5	4	37
79	3	3	4	3	5	3	5	3	4	33	3	3	3	4	3	4	4	3	30
80	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	4	28
81	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29	3	3	4	3	3	4	4	3	30





## Lampiran 3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	112	2.00	5.00	4.0804	.79569
X1.2	112	3.00	5.00	4.1071	.63469
X1.3	112	2.00	5.00	3.9643	.70938
X1.4	112	1.00	5.00	3.8304	.82624
X1.5	112	2.00	5.00	3.9018	.81605
X1.6	112	2.00	5.00	3.8214	.86174
X1.7	112	2.00	5.00	3.9375	.71384
X1.8	112	2.00	5.00	3.9464	.66900
X1.9	112	2.00	5.00	3.7679	.73500
X1	112	27.00	45.00	35.3571	3.65606
X2.1	112	2.00	5.00	3.8661	.70386
X2.2	112	2.00	5.00	3.7679	.72263
X2.3	112	2.00	5.00	3.9196	.72458
X2.4	112	2.00	5.00	3.8929	.66247
X2.5	112	2.00	5.00	4.0893	.72972
X2.6	112	2.00	5.00	3.9018	.70978
X2.7	112	2.00	5.00	3.9821	.65735
X2.8	112	2.00	5.00	3.9286	.68068
X2.9	112	2.00	5.00	3.9732	.71609
X2	112	24.00	45.00	35.3214	3.32399
X3.1	112	2.00	5.00	3.9018	.69697
X3.2	112	2.00	5.00	3.9464	.70824
X3.3	112	2.00	5.00	3.7857	.81017
X3.4	112	2.00	5.00	3.9018	.64319
X3.5	112	2.00	5.00	3.8304	.68298
X3.6	112	2.00	5.00	3.7679	.72263
X3.7	112	2.00	5.00	3.9286	.73171
X3.8	112	2.00	5.00	3.9107	.67855
X3.9	112	2.00	5.00	4.1250	.69910
X3	112	27.00	45.00	35.0982	3.49764
Y.1	112	2.00	5.00	3.9375	.73865
Y.2	112	2.00	5.00	3.9107	.67855
Y.3	112	2.00	5.00	3.7679	.72263
Y.4	112	3.00	5.00	4.0089	.57728
Y.5	112	2.00	5.00	3.9018	.67062
Y.6	112	2.00	5.00	3.9375	.83051





	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.994	.748	.040	.447	.010	.011	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2.4	Pearson Correlation	.201*	.098	.001	1	.542**	.150	.575**	.243**	.089	.597**
	Sig. (2-tailed)	.034	.303	.994		.000	.115	.000	.010	.352	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2.5	Pearson Correlation	.041	.057	.031	.542**	1	-.018	.773**	-.078	.039	.497**
	Sig. (2-tailed)	.668	.552	.748	.000		.853	.000	.415	.682	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2.6	Pearson Correlation	.190*	.236*	.195*	.150	-.018	1	-.023	.694**	.066	.525**
	Sig. (2-tailed)	.045	.012	.040	.115	.853		.809	.000	.491	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2.7	Pearson Correlation	.151	.124	.073	.575**	.773**	-.023	1	.037	.056	.572**
	Sig. (2-tailed)	.113	.193	.447	.000	.000	.809		.695	.555	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2.8	Pearson Correlation	.300**	.351**	.244**	.243**	-.078	.694**	.037	1	.107	.608**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.010	.010	.415	.000	.695		.262	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2.9	Pearson Correlation	.029	-.030	.239*	.089	.039	.066	.056	.107	1	.341**
	Sig. (2-tailed)	.765	.757	.011	.352	.682	.491	.555	.262		.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X2	Pearson Correlation	.558**	.530**	.531**	.597**	.497**	.525**	.572**	.608**	.341**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3
X3.1 Pearson Correlation	1	.646**	-.054	.722**	.116	.205*	.216*	.172	-.049	.584**
Sig. (2-tailed)		.000	.575	.000	.223	.030	.022	.070	.611	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.2 Pearson Correlation	.646**	1	.184	.799**	.205*	.292**	.219*	.196*	-.023	.700**
Sig. (2-tailed)	.000		.052	.000	.031	.002	.021	.038	.812	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.3 Pearson Correlation	-.054	.184	1	.028	.048	-.101	.004	.293**	.382**	.386**
Sig. (2-tailed)	.575	.052		.766	.618	.289	.964	.002	.000	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.4 Pearson Correlation	.722**	.799**	.028	1	.310**	.377**	.272**	.248**	-.033	.733**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.766		.001	.000	.004	.008	.733	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.5 Pearson Correlation	.116	.205*	.048	.310**	1	.358**	.408**	.200*	.083	.543**
Sig. (2-tailed)	.223	.031	.618	.001		.000	.000	.034	.387	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.6 Pearson Correlation	.205*	.292**	-.101	.377**	.358**	1	.309**	.123	.094	.529**
Sig. (2-tailed)	.030	.002	.289	.000	.000		.001	.197	.326	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.7 Pearson Correlation	.216*	.219*	.004	.272**	.408**	.309**	1	.023	.053	.506**
Sig. (2-tailed)	.022	.021	.964	.004	.000	.001		.807	.580	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.8 Pearson Correlation	.172	.196*	.293**	.248**	.200*	.123	.023	1	.593**	.569**
Sig. (2-tailed)	.070	.038	.002	.008	.034	.197	.807		.000	.000
N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X3.9 Pearson Correlation	-.049	-.023	.382**	-.033	.083	.094	.053	.593**	1	.430**



Y.7	Pearson	.000	.554**	.111	.186*	.560**	.129	1	.060	.093	.520**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	1.000	.000	.242	.050	.000	.174		.529	.330	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Y.8	Pearson	.778**	.270**	.373**	.373**	.273**	.190*	.060	1	.129	.680**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000	.004	.045	.529		.176	.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Y.9	Pearson	.116	.089	-.043	.411**	.126	.058	.093	.129	1	.387**
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	.223	.353	.656	.000	.184	.542	.330	.176		.000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Y	Pearson	.604**	.678**	.478**	.616**	.687**	.429**	.520**	.680**	.387**	1
	Correlation										
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## b. Uji Reliabilitas

X1

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	10

X2

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	10

X3

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.730	10

Y

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	10

**Lampiran 5 Analisis Regresi Linier Berganda****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 <sup>a</sup>	.832	.827	1.45957

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1137.031	3	379.010	177.911	.000 <sup>b</sup>
	Residual	230.076	108	2.130		
	Total	1367.107	111			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

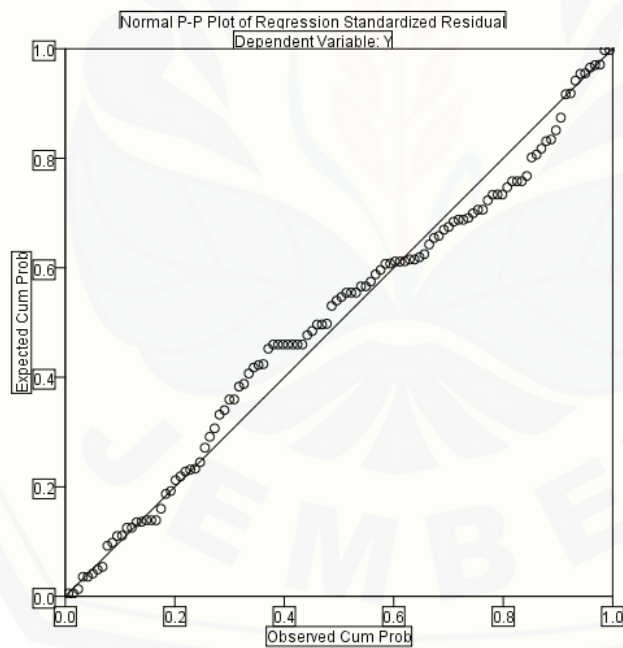
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.385	1.557		.247	.805
	X1	.287	.052	.299	5.496	.000
	X2	.469	.092	.444	5.111	.000
	X3	.259	.081	.258	3.187	.002

a. Dependent Variable: Y

## Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas





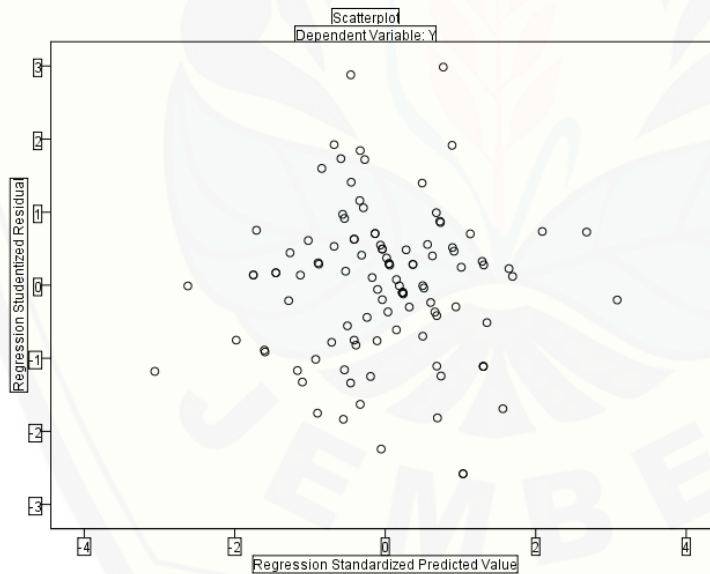
**b. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.385	1.557		.247	.805		
X1	.287	.052	.299	5.496	.000	.526	1.901
X2	.469	.092	.444	5.111	.000	.206	4.847
X3	.259	.081	.258	3.187	.002	.238	4.198

a. Dependent Variable: Y

**c. Uji Heteroskedastisitas**



## Lampiran 7 Uji Hipotesis

### a. Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.385	1.557		.247	.805
	X1	.287	.052	.299	5.496	.000
	X2	.469	.092	.444	5.111	.000
	X3	.259	.081	.258	3.187	.002

a. Dependent Variable: Y

### b. Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1137.031	3	379.010	177.911	.000 <sup>b</sup>
	Residual	230.076	108	2.130		
	Total	1367.107	111			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

### c. Uji Koefisienan Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 <sup>a</sup>	.832	.827	1.45957


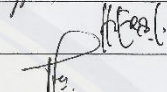

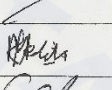

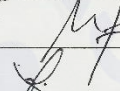
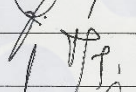
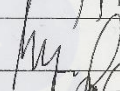
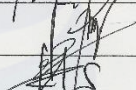
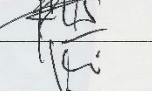
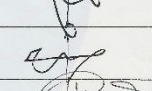
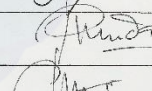

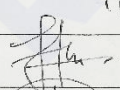
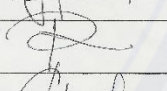
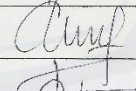
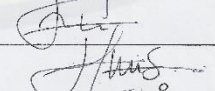
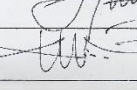
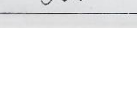




a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

## Lampiran 8 Rtabel

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

## Lampiran 9 Tanda Tangan Kuisisioner

NO.	NAMA	OPD	TANDA TANGAN
1.	Ulfa Nury Wangara	RSP dr Soebandi	
2.	Desi Dwi Lestari Murni	BSD Kalisat	
3.	PERDIANINGTYAS	INSPEKTORAT	
4.	DIANA CAHYANI	KEL. SEKOPAH	
5.	MERLITA KURNIA.P.	BPBD	
6.	Gurukul Ari S	Disnater	
7.	Hilmawati A.	BPZAKB	
8.	Julia Rahmani	sekret. DPRD Jor	
9.	Riti Fahma	staf TSPKAD	
10.	Mufoco	Dinas TPAP	
11.	Andriana	DISPORA	
12.	EKO RADIT	PERPUSDA	
13.	Babnu Colek	Bag. Kesra	
14.	Nur Kholifah	Dinas Sosial	
15.	Rinda	Dinkes	
16.	Chintya	PRKP & CR	
17.	Nunung	DISPERIKAN	
18.	Aliyatus Syamilah	Dinas Pendidikan	
19.	TURIAL	DISTUB	
20.	M. Ghufron	BM & SDA	
21.	Angga	Dinas Pariwisata	
22.	Yudi	BAPENDA	
23.	Sulistyaningsih	Dispendik capil	









DAFTAR HADIR PERTEMUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 INPUT SALDO AWAL TAHUN ANGGARAN 2020  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH  
 Jl. Sudirman No.01 Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember



NO.	NAMA	OPD	TANDA TANGAN
1	A. Ali S	Kec. Ajung	
2	Nita Fauziah	Kec. Patrang	
3	W. Buntar	PPM & PRSP	
4	Rizki Mahyuda	Kec. Bangsal Sari	
5	Poniman	Kec. Bangsal Sari	
6	Trar	Kec. Kalisat	
7	ZAINAL A	Kec. Patung	
8	Lambang	DLH	
9	Wahyu Andy	DLH	
10	FERI F	Bag. pembangunan	
11	Satpoc PP	Saiful	
12	Aan Usufun H.	Kec. Sukawono	
13	Abel Gafur	Kec. Tazre	
14	Edy S	Kec. Jethari	
15	Alimad Fauzi	Bakasrengol	
16	Hisam	Kec. Arjasa	
17	Cilvi	Bag. Humas	
18	Fayih	BPKAD	
19	Holis	1	
20	HASAN	Kec. Sumberbaru	
21	MUNSIH	Kec. Pant	
22	DEDI	Kec. Pangajene	
23	Randy A	Kec. Jenggul	



DAFTAR HADIR PERTEMUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 INPUT SALDO AWAL TAHUN ANGGARAN 2020  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH  
 Jl. Sudarman No.01 Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember



24	Lu Sri Roselinus	Kec. Kenosoy	<i>[Signature]</i>
25	Agustini	Bag. OTG	<i>[Signature]</i>
26	Suharlina	Kec. Liawi wate	<i>[Signature]</i>
27	Satrijagung Agus S	Bag. Hukum	<i>[Signature]</i>
28	Inayati A	Stas Kominfo	<i>[Signature]</i>
29	Sopyan	Kec. Sumber	<i>[Signature]</i>
30	Dakus	Bag. Umum	<i>[Signature]</i>
31	NIVIA HEPTIANA	Fec. Jombang	<i>[Signature]</i>
32	Heni Rosant	Bag. tapen	<i>[Signature]</i>
33	Yudi	Kec. Mumbulsari	<i>[Signature]</i>
34	Diana	koperasi & Umum	<i>[Signature]</i>
35	Udik R.	Kec. Tempurejo	<i>[Signature]</i>
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			



